

*MEMORIA PASSIONIS*

---

**SKETSA  
SEJARAH PERLAWANAN DAN  
PENDERITAAN  
MASYARAKAT PANIAI**

**DI SEKITAR TIGA DANAU BESAR  
KABUPATEN PANIAI, PAPUA**

disusun oleh

**SEKRETARIAT Keadilan & Perdamaian  
Keuskupan Jayapura  
Papua, Indonesia**

JAYAPURA  
NOVEMBER 2000

KEUSKUPAN JAYAPURA  
KOTAK POS 1379  
JAYAPURA 99013  
PAPUA—INDONESIA

SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN  
TEL: +62-967-534993  
FAX: +62-967-534993  
E-Mail:sekkp@jayapura.wasantara.net.id

*OFFICE FOR JUSTICE AND PEACE-DIOCESE OF JAYAPURA*

No. : 139/BD/00/3.4.10

Hal : Laporan Paniai

**Yang Terhormat**

Pangdam XVII/ Trikora

May. Jend. TNI Tonny A. Rompis

di JAYAPURA

Dengan hormat,

Menanggapi ajakan Bapak Panglima untuk menyampaikan informasi mengenai situasi umat, pada kesempatan ini kami serahkan satu laporan keadaan sebagian masyarakat dan umat kami dalam berkas laporan yang berjudul: **SKETSA SEJARAH PERLAWANAN DAN PENDERITAAN MASYARAKAT DI SEKITAR TIGA DANAU BESAR KABUPATEN PANIAI.**

Laporan ini pada intinya merupakan analisis atas peristiwa-peristiwa yang dialami oleh masyarakat Paniai khususnya setelah munculnya gerakan Tadeus Yogi dan operasi-operasi militer. Peristiwa-peristiwa itu coba ditempatkan dalam kerangka sejarah masyarakat Paniai sendiri khususnya dalam kaitan dengan peristiwa penting di Obano tahun 1956, Paniai tahun 1969, dan di Madi tahun 1981. Jika ditempatkan dalam sejarah perlawanan dan penderitaan masyarakat Paniai, menjadi jelas bahwa peristiwa-peristiwa yang ditulis dalam laporan berikut ini bukanlah insiden-insiden baru dan serba kebetulan. Peristiwa-peristiwa serupa sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di satu pihak dan menjadi cara hadir militer di lain pihak. Kami juga pernah melaporkan situasi serupa kepada pihak Pangdam XVII/ Trikora pada bulan Oktober 1998 dalam berkas: **LAPORAN SITUASI HAK-HAK AZASI MANUSIA DI WILAYAH PANIAI DAN TIGI, IRIAN JAYA.** Dengan data yang tersedia dan kaitan dengan sejarah di masa-masa sebelumnya, kiranya menjadi cukup lengkap gambaran situasi masyarakat di wilayah sekitar Tiga Danau Besar berikut kekecewaan, penderitaan, daya juang, dan harapan mereka.

Situasi seperti yang dilaporkan berikut ini dan sebelumnya kiranya akan terus mengganggu kehidupan harian masyarakat Paniai, khususnya, dan masyarakat Papua pada umumnya apalagi dalam situasi di mana sedang hangat disuarakan aspirasi kemerdekaan Papua.

Karena itu kami mohon perhatian dan keterbukaan hati Bapak Panglima atas situasi

masyarakat yang sama-sama kita layani agar berkembang ke arah situasi yang lebih manusiawi.  
Tak lupa kami ucapkan terimakasih atas perhatian.

Jayapura, 25 November 2000

Teriring salam dan hormat kami,

Mgr. Leo Laba Ladjar OFM

Uskup Jayapura

Turut mengetahui,

Pdt. Herman Saud MTh.  
Ketua Sinode GKI Papua

Pdt. John Gobay STh.  
Ketua Sinode GKII

**Tembusan:**

1. Gubernur KDH Tk. I Irian Jaya
2. Kapolda Irian Jaya
3. Ketua DPRD Tk. I Irian Jaya
4. Pastor Paroki St. Yusup Enarotali
5. Pastor Paroki St. Yohanes Pemandi Waghete
6. Vikep Kevikepan Wilayah Barat
7. Uskup-uskup se-Papua
8. Ketua Konferensi Waligereja Indonesia
9. Gereja-gereja di Tanah Papua
10. Jaringan Kerja SKP Keuskupan Jayapura

# SKETSA SEJARAH PERLAWANAN DAN PENDERITAAN MASYARAKAT PANIAI DI SEKITAR TIGA DANAU BESAR KABUPATEN PANIAI

**I**ngatan kolektif masyarakat di sekitar Danau-danau besar: Paniai, Tage, Tigi, di Kabupaten Paniai menyimpan kisah sejarah penderitaan yang cukup panjang: perang Obano tahun 1956, perlawanan rakyat Paniai tahun 1969 dan Perang Madi tahun 1981. Tiga peristiwa berdarah ini sangat melekat di dalam ingatan masyarakat karena telah memakan korban dan menggoreskan trauma. Selain itu, ketiganya menjadi akar konflik masyarakat Paniai sekaligus motor gerakan perlawanan rakyat. Dalam perkembangannya, gerakan perlawanan rakyat Paniai melahirkan kelompok-kelompok yang menamakan diri: Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kelompok yang dipimpin oleh Simon Kogoya lebih banyak bergerak di wilayah Moni. Kelompok yang dipimpin oleh Goo bergerak di Lembah Kamu; dan kelompok yang bergiat di sekitar Tiga Danau Besar dipimpin oleh Tadeus Johny Maga Yogi (disingkat: Yogi). Pemerintah Indonesia menjawab kehadiran kelompok OPM dengan pemberlakuan status “Daerah Operasi Militer (disingkat: DOM)” di mana kelompok OPM aktif bergerak. Konflik, perlawanan rakyat, gerakan OPM, status DOM, operasi militer—semuanya menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang jauh dari rasa aman dan tenang.

Setelah lewat hampir tiga dasawarsa ternyata dampak pemberlakuan DOM masih cukup nyata. Misalnya, pada tahun 1998 dilaporkan oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP)<sup>1</sup> mengenai pola kekerasan militer terhadap masyarakat dengan dalih pengejaran terhadap kelompok OPM yang dipimpin oleh Yogi. Selain tindak kekerasan belakangan diketahui bahwa sejak tahun 1982, diberlakukan sejumlah kewajiban terhadap masyarakat desa yang sangat menekan dan memperdalam trauma yang sudah lama diderita. Situasi sedemikian ini ternyata terus menjadi beban masyarakat hingga tahun 2000 ini. Karena itu, SKP Keuskupan Jayapura mengadakan pengkajian terbatas mengenai sejarah penderitaan masyarakat Paniai yang hasilnya dituangkan dalam laporan ini.

---

<sup>1</sup> Laporan yang dimaksudkan adalah “Laporan Situasi Hak-hak Azasi Manusia di Wilayah Paniai dan Tigi”, oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, Oktober 1998. Laporan ini dialamatkan kepada Pangdam VIII/ Trikora saat itu, yakni Mayjend. TNI Amir Sembiring.

Laporan ini bermaksud menggambarkan situasi aktual dalam bingkai peristiwa penting di masa lampau yang menjadi akar seluruh situasi masa kini. Secara sistematis, laporan ini terdiri dari empat bagian:

- I. Beberapa puncak sejarah penderitaan masyarakat Paniai sejak 1950: Perlawanan Rakyat Obano 1956, Perlawanan Rakyat Paniai 1969 dan Perang Madi 1981. Bagian ini akan menguraikan secara padat tiga peristiwa yang menjadi bagian sejarah penderitaan masyarakat Paniai.
- II. Situasi Paniai 1998: bagian ini akan menyebutkan secara singkat isi laporan SKP Oktober 1998 dan kelanjutannya dari kasus yang dilaporkan.
- III. Situasi Paniai 1999 – awal 2000: bagian ini akan menguraikan kasus-kasus aktual yang dialami oleh masyarakat desa di wilayah Kecamatan Paniai Timur dan Kecamatan Tigi.
- IV. Analisis dan kesimpulan: bagian ini akan mengkaji seluruh benang merah peristiwa mulai dari sejarah hingga kasus-kasus aktual.

## ***BAGIAN I***

# **PERISTIWA OBANO 1956, PANIAI 1969 DAN MADI 1981**

### **I.1. Peristiwa Obano 1956**

Salah satu dari tiga peristiwa yang pada intinya merupakan gerakan perlawanan masyarakat adalah Peristiwa Obano. Peristiwa Obano (1956) berakar pada sikap penolakan terhadap “apa saja yang datang dari luar”: pemerintah (Belanda), polisi, misionaris, pokoknya orang-orang asing (artinya: bukan orang Ekagi/Mee). Pada umumnya masyarakat merasa bahwa tata hidup mereka terganggu oleh pengaruh-pengaruh dari luar, dan gangguan itu tidak diimbangi dengan turut menikmati keuntungan, kekayaan yang dipamerkan orang-orang dari luar<sup>2</sup>. Maka, munculnya konflik sosio-budaya. Perasaan ini sebenarnya bukan keistimewaan milik masyarakat Obano saja. Tetangga-tetangganya merasakan hal yang sama dan tepat untuk dicatat bahwa pemberontakan di Obano pada tahun 1956 sudah didahului oleh pemberontakan oleh masyarakat Komopa pada tahun 1954. Apalagi selama tahun 1954 dan 1955 daerah Paniai ditimpa pelbagai wabah yang menuntut banyak korban. Tokoh-tokoh adat mulai menceritakan bahwa wabah-wabah itu disebabkan antara lain oleh babi-babi putih yang diintroduksi oleh orang kulit putih, dan wabah penyakit lainnya. Ditambah pada rasa tidak puas, rasa marah yang agak umum, secara khusus masyarakat Obano terhadap pihak polisi a.l. bernama Rumbiak yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat di Obano dengan tindakan seperti menganiaya masyarakat, mencuri babi, menembak babi sembarangan, atau memperkosa perempuan. Polisi (yang untuk sebagian besar terdiri dari orang Papua) dilihat sebagai perpanjangan tangan pihak yang berkuasa, ialah orang kulit putih, maka mereka menjadi salah satu sasaran khusus. Banyak masyarakat juga marah dengan pendeta-pendeta yang menyebarkan agama Kristen dengan cara melecehkan warisan adat seperti alat-alat budaya dirusak, upacara-upacara adat dilarang. Kompleks kemarahan ini akhirnya memuncak pada tanggal 4 November 1956 dan menjadi tindak kekerasan massa dengan membunuh Polisi Rumbiak, dua keluarga guru yang tinggal di Obano, dan merusak 1 pesawat Cessna milik MAF sambil membakar gedung-gedung dan rumah-rumah. Selama satu setengah bulan kekerasan mewarnai wilayah itu dan sekitar 10-20 orang warga masyarakat menjadi korban. Baru pada tanggal 17 Desember 1956 aksi-aksi oleh pihak yang berwajib berhasil mengakhiri pemberontakan masyarakat ini. Pemberontakan selesai.

### **I.2. Peristiwa Paniai 1969**

---

<sup>2</sup> Alfons van Nunen ofm, Nota omtrent de Obano-opstand, Enarotali 1957.

Tahun 1968-1969 suasana Paniai diwarnai dengan pergolakan hebat dari masyarakat Papua untuk menolak kehadiran tentara Indonesia yang mau mengawasi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Masyarakat ternyata sudah tahu mengenai rencana Pepera dan sudah memperoleh berita bahwa di seluruh wilayah Papua masyarakat mulai menolak rencana pelaksanaan Pepera itu, dan siap untuk melawannya. Keberatan terhadap Pepera ini kemudian diterjemahkan dalam suatu aksi “anti semua warga Indonesia” (maka banyak orang diungsikan, lebih-lebih tenaga guru), dan secara khusus “anti tentara”. Karenanya masyarakat menuntut supaya tentara ditarik seluruhnya dari Enarotali. Tuntutan itu tidak dipenuhi oleh Panglima meskipun disampaikan oleh Bapak Karel Gobai (wakil Bupati Paniai) beserta seluruh risiko yang harus ditanggung jika Panglima menolak. Akibatnya, terjadilah perang antara masyarakat dengan tentara Indonesia<sup>3</sup>. Gerakan perlawanan rakyat untuk sebagian besar dipimpin dari Moanemani oleh dua anggota polisi Bapak Senin Mote dan Bapak Mappia Mote bersama Camat Waghete Bapak Wamafma. Sesaat tidak dapat bertahan lagi di Moanemani mereka mengungsi ke wilayah Timeepa/Epomani dan dari sana mereka melanjutkan perlawanannya bersama rakyat. Sesaat kedua Bapak Mote menyadari bahwa perjuangan mereka tidak akan membawa hasil, apalagi menyadari bahwa mereka kurang mendapat dukungan dari daerah-daerah lain di Tanah Papua, mereka meminta jasa Gereja Katolik untuk mencapai suatu kesepakatan damai dengan Jenderal Sarwo Edhi<sup>4</sup>. Akibat perang tersebut banyak masyarakat menjadi korban (seperti Natalis Aadi, motoris misi Katolik) dan lebih banyak lagi di pihak tentara (seperti Kopral La Tjeleng). Belum lagi penjarahan yang dilakukan oleh tentara terhadap barang-barang milik gereja ataupun milik guru-guru yang mengungsi<sup>5</sup>.

### **1.3. Peristiwa Madi 1981**

Pada tahun 1981 giliran Desa Madi menjadi pusat peristiwa kekerasan. Masyarakat tergabung dalam kelompok OPM yang dipimpin oleh Tadeus Yogi tiba-tiba menampilkan dirinya di hadapan tim Televisi Belanda KRO<sup>6</sup>. Pemunculan Papanal (Pasukan Pembebasan Nasional) dibawah pimpinan Yogi dengan ratusan pengikutnya rupanya mendatangkan kegusaran pada pihak tentara Indonesia. Karenanya tentara menjawab dengan operasi militer di Madi dan sekitarnya, mulai 20 Oktober 1981. Terjadi perlawanan oleh Papanal yang berpusat di Desa Madi dengan tentara yang berpusat di Enarotali. Dalam bentrokan antara kelompok Papanal dengan tentara itu, tentara pada awalnya terkesan banyak menahan diri dan lebih banyak membuat gertakan a.l. dengan menjatuhkan bom asap dari udara (selama tiga hari pada awal November 1981) atau bunyi bazooka. Namun demikian bentrokan yang berkepanjangan (hampir satu tahun lamanya)

---

<sup>3</sup> Laporan intern Gereja Katolik oleh Pater A. Soemandar SJ di Djajapura, 30 Mei 1969.

<sup>4</sup> Joop Sierat, “Rapadaba, Mensen aan de Wisselmeren Irian Jaya”, Bonneville, 1999, hlm. 355-378.

<sup>5</sup> Pergolakan di Enarotali berikut segala dampaknya dilaporkan oleh Pater Haripranata SJ (Direktur Pusat Katolik, di Sukarnapura-Irian Barat) kepada Brigjend. Sarwo Edhi Wibowo selaku Panglima Operasi Wibawa dalam surat no. 526 tanggal 9 Juni 1969.

<sup>6</sup> Seluruh kejadian pemunculan kelompok Yogi secara tak terduga ini telah dilaporkan kepada Danrem 173 Biak. Pater E. Bruinsma ofm (yang kebetulan mengantarkan Tim Televisi Belanda) dipanggil dan diinterogasi oleh Kasi I Intel Korem 173/ PVB tanggal 17 Desember 1981 akibat peristiwa yang tidak disangka-sangka tersebut.

menghasilkan suatu suasana yang serba kacau, dimana –seperti biasa - rakyat kecil menjadi korban utama.

Pada awalnya Desa Madi dibakar habis; namun dalam salah satu laporan<sup>7</sup> dapat kami baca “di Madi, Timida, Bibida, Pugo segala apa sudah dibakar” kecuali satu dua gedung gereja. Bukan gedung saja menjadi sasaran, ternyata juga cukup berbahaya untuk bergerak seperti biasa saja; ada beberapa laporan mengenai orang yang ditembak mati, sedang alasan sama sekali tidak jelas, atau hanya karena mereka sedang bekerja di kebun<sup>8</sup>. Dalam suatu laporan pada pertengahan Agustus 1982, seorang pastor menyimpulkan:

- (1) sejak Oktober tahun lalu sampai Agustus 1982 ini, situasi sangat jelek, tidak hanya untuk gereja, tetapi untuk umum;
- (2) yang paling menderita ialah rakyat kecil dari Madi, Timida, Bibida, Pugo dan Enaro. Mereka tidak punyai rumah, kebun, babi lagi. Semuanya habis dibakar atau dicuri. Rakyat sungguh jatuh miskin ; semua mereka berada dalam ketakutan yang luarbiasa. Sungguh terasa tidak aman; dan tetap saja kerinduan semoga suasana secepat mungkin pulih kembali<sup>9</sup>.

Rakyat kecil sungguh-sungguh terjepit dan pelan-pelan banyak pengikut dalam bentrokan ini mulai merasa tidak ada kemajuan sehingga mengundurkan diri. Sisanya tetap bertahan di bawah pimpinan Yogi.

Selama berjalannya peristiwa Madi, TNI mulai mendirikan pos-pos militer di berbagai tempat di Wilayah Tiga Danau; walau peristiwa Madi selesai (akhir 1982) pada tahun-tahun sesudahnya berbagai operasi militer dilancarkan dari pusat-pusat itu dengan tujuan menghancurkan kelompok Yogi. Status DOM diterapkan dan dari operasi militer inilah, semua akibat buruk menimpa masyarakat Paniai.

#### **I.4. Kesimpulan singkat**

Berdasarkan tiga peristiwa di masa lampau itu, boleh disimpulkan bahwa

[1] masyarakat Paniai memiliki tradisi perlawanan rakyat terhadap segala sesuatu dari luar yang bersifat mengancam,

[2] sejarah korban yang meskipun pahit tetapi tetap dikenang justru sebagai kekuatan untuk terus bertahan.

---

<sup>7</sup> Laporan dari pihak Gereja Katolik, 27 Juni 1982.

<sup>8</sup> Laporan dari Gereja Katolik, 5 Mei dan 8 Juli 1982. Pada tanggal 5 Mei seorang pemuda ditembak mati di Enaro; pembunuhan terhadap seorang tua yang sedang kerja di kebunnya dekat Madi pada tanggal 18 Juni; pembunuhan terhadap Teneituma Gobai (Timida) yang sedang mengerjakan kebunnya; penculikan disusul dengan pembunuhan terhadap tiga orang pemuda (Yusuf Bunai, Pius Magai dan Yulianus Yeimo) dengan alasan yang tidak jelas pada tanggal 6 Juli 1982.

<sup>9</sup> Laporan dari Gereja Katolik, 18 Agustus 1982.

## ***BAGIAN II***

# **SITUASI TAHUN 1998**

### **II.1. Laporan SKP Oktober 1998**

Laporan SKP bulan Oktober 1998 bisa menjadi salah satu indikator perkembangan situasi sosial kemasyarakatan di wilayah Paniai setelah DOM berjalan selama kurang lebih tiga dasawarsa. Dalam laporan itu, perhatian diarahkan pada suasana kemasyarakatan yang sangat dipengaruhi oleh kehadiran sekelompok OPM dibawah pimpinan Tadeus Yogi. Pada gilirannya kehadiran itu dimanfaatkan oleh TNI (Yonif 712 Rajawali) untuk berperilaku sangat arogan bahkan seakan-akan merasa berhak bertindak sewenang-wenang: mengeluarkan segala macam kewajiban/peraturan secara sepihak, menjatuhkan hukuman badan, meminta denda uang, babi, hasil bumi. Sikap demikian telah mengakibatkan tetap terpeliharanya suasana ketakutan secara umum dan terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM secara khusus. Masyarakat Desa makin takut dan makin merasa kurang berdaya untuk mengatasi suasana yang melumpuhkan ini. Hati orang tetap terluka sangat mendalam.

Suasana yang disebutkan di atas telah disampaikan oleh Keuskupan Jayapura kepada Pangdam VIII/ Trikora Mayjend. TNI Amir Sembiring pada bulan Maret 1998; dan kemudian dijadikan bahan suatu laporan yang lebih lengkap (bulan Oktober 1998)<sup>10</sup>. Walaupun SKP tidak pernah mendapat informasi lebih lanjut dari pihak TNI mengenai tindakan-tindakan hukum mana yang telah diambil, dari beberapa laporan intern Gereja Katolik kami dapat menyimpulkan bahwa pihak TNI telah menindaklanjuti pengaduan pihak Keuskupan Jayapura. Setelah berjalan dalam rentang waktu satu tahun, terdapat perubahan yang cukup nyata di wilayah Enarotali sedangkan di wilayah Tigi perubahan kurang terasa.

### **II.2. Kelanjutan di wilayah Enarotali**

Perkembangan di Enarotali bisa dilihat dari sejumlah indikasi berikut ini berdasarkan laporan intern Gereja Katolik Enarotali<sup>11</sup>:

- *Keberadaan pasukan Yonif 712 Rajawali: sudah tidak berada di Enarotali...*
- *Pasukan tempur/Satgas Darat lainnya di Enarotali, tidak ada tambahan lagi kecuali yang tetap yang selalu pergantian setiap enam atau sepuluh bulan adalah Timsus Yonif 753 Nabire; dan yang tetap adalah Koramil Enarotali. Kami menilai dua angkatan ini dan*

---

<sup>10</sup> "Laporan Situasi: Hak-Hak Asazi Manusia di Wilayah Paniai dan Tigi, Irian Jaya", oleh SKP, Keuskupan Jayapura, Oktober 1998.

<sup>11</sup> Laporan intern Gereja Katolik tertanggal 22 Maret 1999 ini dikutip secara harafiah.

*ditambah polisi masih bersikap baik, untuk sementara tidak ada keluhan dari masyarakat, malah yang ada mau berkontak baik dengan masyarakat, beberapa anggota dari Timsus Yonif 753 beberapa kali sering datang ke Gereja Katolik membantu kerja rehab gedung Gereja Enarotali. Juga yang ada di pos Uwibutu untuk sementara hubungan baik dengan masyarakat.*

- *Harapan Masyarakat: rekomendasi yang ditulis dalam "Laporan" (menyangkut ganti rugi dan pemulihan lainnya), sampai saat ini masyarakat tidak menuntut ganti rugi, hanya harapan mereka agar pasukan sejenis Yonif 712 Rajawali tidak ada lagi di Paniai khususnya Enarotali.*

### **II.3. Kelanjutan di wilayah Tigi**

Akan tetapi, di wilayah Tigi belum terdapat suatu perubahan yang mendasar. Hal itu dapat kami simpulkan dari laporan intern tertanggal 3 Maret 1999, yang antara lain berbunyi sebagai berikut<sup>12</sup>:

- *Tidak ada tambahan pasukan di Waghete, tetapi seperti biasa ada timsus yang selalu datang bergantian. Nah merekalah yang sering bikin onar, misalnya, minum sampai mabuk dan bertindak diluar disiplin ABRI. Doktrin: menciptakan musuh agar kelihatan ada tugas, masih sangat kentara. Akibatnya, justru ada mereka malahan tidak tenang. (Cuma sayang, bahwa yang sering bermasalah dengan tentara tidak mau memberikan informasi jelas, barangkali ketakutan akan terjadi sesuatu yang lebih jelek pada mereka).*
- *Reaksi masyarakat: sama sekali tidak menghendaki adanya oknum yang tanpa argumentasi yang bisa disepakati bersama atau dimusyawarahkan, maka pada umumnya menolak kehadiran oknum penguasa yang menggunakan kekerasan militer. Misalnya: tidak mau ikut bekerja sama dengan tentara yang mau membuat jembatan di Okomokebo. Menurut saya istilah kerjasama sudah berbeda persepsi antara masyarakat dan tentara. Kerjasama model tentara, dengan kekerasan dan ultimatum, masyarakat disuruh berpartisipasi dalam tugas tentara atau yang lebih dikenal dengan proyek tentara. Barangkali tentara yang sekarang ini mau mencari muka dan berusaha mengambil hati masyarakat. Namun masyarakat tidak mau ditipu untuk yang kedua kalinya.*
- *Mereka sebagian tahu bahwa kasusnya yang terjadi setahun yang lalu telah diketahui instansi-instansi di Jayapura. Namun mereka pesimis akan tindakan selanjutnya, mereka baru akan menyuarakan apa yang ada dalam hatinya kalau benar-benar sudah ada tindakan nyata. Bisa dikatakan bahwa keadaan sekarang sudah tenang, namun tenang seperti gunung es atau gunung api. Sekali-kali pasti akan meletus, tinggal tunggu waktu saja.*

---

<sup>12</sup> Pokok-pokok dari Laporan Intern Gereja Katolik, 3 Maret 1999 ini dikutip secara harafiah.

- *Perlu saya sampaikan kejadian yang akhir-akhir ini tampak menonjol:*
  - a. *Masyarakat sudah hampir tidak punya kepercayaan lagi kepada tentara*
  - b. *Tentara masuk melalui bidang pendidikan, yaitu mau mengabdikan menjadi guru, walaupun tidak punya ijazah guru*
  - c. *Tentara mengharuskan LSM (dari Perancis untuk air bersih dan gizi) melaporkan kepada komandan mengenai jadwal kerjanya agar tentara bisa mengawalinya*
  
- *Tanggapan yang muncul atas kejadian tersebut: sekolah menolak cara dan keinginan tentara untuk terlibat dalam bidang sosial/pendidikan, karena sekolah itu bukan garis komando seperti tentara, tetapi garis intelektual dan berargumentasi, jiwa mendidik harus dimiliki, bukan dengan kekerasan. LSM (yang menamakan dirinya Action Fight Hungry dari Perancis) juga akan stop kalau tentara membayangkan-bayangkan pekerjaan mereka.*

## ***BAGIAN III***

### **SITUASI AKTUAL TAHUN 1999–KINI**

#### **III.1. Kelompok Yogi dalam dua tahun terakhir**

Jelaslah bahwa sejarah penderitaan masyarakat Paniai tidak bisa dilepaskan dari peran tentara dan peran kelompok OPM. Hal ini de facto telah terjadi selama lebih dari tiga dasawarsa. Karena itu perlulah diteliti terlebih dulu: kehadiran Yogi dalam dua tahun terakhir (1999-sekarang) dan kehadiran tentara dalam waktu yang sama.

Kehadiran sekelompok OPM yang dipimpin oleh Tadeus Yogi terus-menerus diperalat oleh tentara sebagai alasan kehadirannya dan untuk segala macam tindakan tentara sehingga menjadi salah satu unsur sumber konflik di daerah ini. Hubungan yang semu antara kedua unsur kekuasaan itu tetap merupakan salah satu faktor keresahan bagi masyarakat desa di wilayah sekitar Tiga Danau. Persoalan Yogi sebenarnya sudah lama bisa diselesaikan dalam tahun 1985 oleh pihak tentara seandainya ada kesungguhan dalam hal ini (sebagaimana dilaporkan secara lebih terperinci dalam laporan SKP, Oktober 1998). Akibat tindakan membiarkan dari pihak tentara, persoalan Yogi tetap berlarut-larut hingga memasuki tahun 2000 ini.

#### **III.1.1. Kelompok Yogi dalam kaitan dengan kegiatan PT. Freeport**

Pada bulan September 1999 mulai tersebar berita bahwa Yogi dengan 24 anak buahnya berniat untuk menyerahkan diri kepada militer. Yogi dkk. sebenarnya berniat untuk memulai suatu perjuangan demi kemerdekaan Papua pada jalur diplomasi seperti halnya teman-teman pejuang Papua lainnya di kota. Niat itu ditanggapi dengan serius oleh pihak militer yang di mata Yogi adalah orang-orang Freeport.

Rencana penyerahan ini berkembang setelah sejumlah anggota kelompok Yogi menekan para karyawan PT. Freeport di Exploration Camp B di Komopa untuk membantu (tgl. 25 Agustus 1999). Jelas tekanan serta ancaman yang tersirat dalam suasana menuntut ini membuat pihak pengusaha (PT. Freeport) gelisah. Karena merasa bahwa pekerjaan mereka terhalang PT. Freeport bersedia untuk membayar segala macam fasilitas yang menjadi isi kesepakatan antara pihak Yogi, pihak militer dan pihak Freeport (membangun perumahan, menjamin jatah makanan selama satu tahun, membangun sekolah, puskesmas dan gereja). Segala bantuan ini diarahkan kepada tempat di mana Yogi nanti mau menetap, yakni Desa Badauwo.

Walau tanggal acara penyerahan sudah ditetapkan oleh pihak militer, ternyata masyarakat di sekitar Desa Badauwo, termasuk para tokoh masyarakat dan Gereja kurang mengetahui rencana ini. Apalagi bagi masyarakat Desa Madi (tempat asal Yogi) rencana Yogi kurang dapat diterima;

atau lebih tepat: dapat diterima asal Yogi membayar dulu segala denda guna melunasi segala kerugian dan penderitaan yang selama bertahun-tahun ditanggung oleh masyarakat Desa Madi karena gerakan Yogi. Jelaslah bahwa mereka sama sekali tidak dapat menerima bahwa segala bantuan nanti diarahkan kepada masyarakat Badauwo. Seharusnya masyarakat Madi-lah yang berhak menerima bantuan sebab sudah menderita sekian lama. Asal dibayar secara penuh, masyarakat Madi bersedia untuk mengampuni Yogi karena mereka mengharapkan bahwa dengan penyerahan Yogi, tentara akan ditarik keluar dari Madi dan sejumlah desa lainnya. Tambah lagi bahwa mereka bersedia untuk menerima segala hal yang sudah mereka derita “jika nanti kemerdekaan tercapai”; namun kalau tidak, pastilah suatu konflik horizontal sulit dihindari.

Dalam perkembangannya, ternyata rencana penyerahan Yogi dkk. yang dipersiapkan oleh pihak militer dengan dukungan PT. Freeport, tidak terwujud entah dengan alasan apa. Terbukti kelompok Yogi mulai awal tahun 2000 ini malah tampil terbuka di salah satu bukit di Desa Badauwo. Berdasarkan informasi yang ada, kelompok Yogi juga menempati sejumlah pondok dan kamp khusus untuk Yogi yang lengkap dengan fasilitas radio SSB dan handy-talkie entah darimana asalnya. Berdasarkan pengamatan kami sendiri dapat disimpulkan bahwa Yogi dkk. dijamin kehidupannya secara sangat nyata, lengkap dengan pakaian militir serta hiasan-hiasan pangkatnya. Dari pembicaraan yang langsung kami dengar dari pihak-pihak yang terlibat, dapat kami simpulkan bahwa kehadiran kelompok Yogi dipergunakan oleh aparat keamanan demi agendanya sendiri.

### **III.1.2. Kelompok Yogi dalam kaitan dengan kunjungan Wapres Megawati**

Pada tanggal 13 Mei 2000 sebelum kunjungan Wapres Megawati ke Enarotali, ada empat orang intel dibawah pimpinan Kolonel Darmin Torri, Kasrem Biak – Numfor, mendatangi Yogi di Badauwo. Tim Intel tersebut memperkenalkan diri sebagai utusan khusus dari Jakarta untuk menyampaikan pesan Wapres kepada Yogi. Menurut para intel tersebut, Ibu Mega meminta kepada Yogi supaya datang menyampaikan aspirasinya kepada Wapres dalam tatap muka dengan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, mereka mewawancarai Yogi seputar aspirasi Papua Merdeka sampai tengah siang. Pada tanggal 18 Mei 2000, keempat orang intel tersebut meninggalkan Enarotali.

Pada tanggal 20 Mei 2000, rombongan Yogi datang beraksi demo terhadap Wapres di lapangan sepak bola Enarotali dengan tari-tarian adat (waita). Mereka semua datang dengan membawa bendera Bintang Kejora dan sejumlah spanduk yang bertuliskan tuntutan Papua Merdeka. Ketika kelompok Yogi muncul, pemerintah daerah setempat merasa bingung dan terkejut karena apa yang terjadi pada saat itu ialah di luar dugaan mereka. Sebelumnya Yogi telah meminta kepada pemerintah daerah supaya keinginannya untuk berdialog dengan Wapres bisa dimasukkan dalam acara penyambutan Wapres. Namun permohonan Yogi tersebut ditolak oleh Pemda Paniai dengan alasan Wapres tidak datang untuk mengurus kegiatan politik Bangsa Papua; melainkan datang memantau situasi pembangunan di Papua dan langkah-langkah apa yang

harus diambil oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan ke depan. Yogi tetap datang menemui Megawati, tetapi keinginannya itu tak terkabulkan karena Wapres Megawati segera diangkut dengan helikopter ke Nabire.

Pada tanggal 21 Mei 2000 pasukan TNI dari Yonif 753 Nabire melakukan aksi penembakan peluru di sepanjang jalan dari Etenidimi sampai dengan pos Uwibutu, Madi. Sore pk. 18.00 - 19.00 WIT pada hari yang sama, Danpos memanggil Bosco Gebi, aparat desa Madi, dan Martinus Mote, Hansip dari desa yang sama pula. Selanjutnya kedua orang tersebut direndam ke dalam kolam ikan hingga pagi hari dengan tuduhan terlibat dalam aksi demo yang diprakarsai oleh Yogi pada tanggal 20 Mei 2000. Melalui Jan Mote, pembantu tentara di pos Uwibutu, tentara menuntut denda kepada masyarakat. Setelah mendengar permintaan tersebut, masyarakat menafsirkannya sebagai cara militer meminta korban nyawa masyarakat. Pada malam itu mereka berencana ingin melarikan diri dari daerah Madi dengan naik perahu kayu yang mereka siapkan pada malam itu juga. Sebagian masyarakat Madi membunuh sejumlah ternak mereka pada malam itu juga untuk makan bersama sebelum mereka berpisah; daripada direbut tentara sebagaimana biasanya. Namun karena masih ragu-ragu, mereka mengutus Jan Mote ke pos tentara untuk mengetahui apakah tuntutan itu berlaku untuk semua desa atau hanya berlaku bagi pos Madi sebab tidak adil bila yang dihukum hanya desa Madi padahal semua desa sudah terlibat dalam aksi demo tersebut. Ternyata diketahui bahwa tuntutan tersebut berlaku bagi semua desa (Madi hingga Bibida) sehingga masyarakat Desa Madi membatalkan rencana mereka untuk meninggalkan Desa Madi.

Keesokan harinya (22 Mei 2000), mereka mengumpulkan uang Rp 300.000 untuk diserahkan kepada tentara; namun tentara menolak uang dan tetap meminta kambing atau anjing. Maka uang tersebut dipakai untuk membeli seekor kambing kepunyaan bapak Jan Mote. Karena tentara merasa bahwa keinginan mereka dipenuhi oleh masyarakat setempat, pada tanggal 23 Mei 2000 tentara menyuruh masyarakat berkumpul di balai Desa Madi untuk mencek siapa-siapa yang terlibat dalam aksi demo di Enaritali dalam penyambutan Wapres Megawati. Mereka diminta oleh tentara membentuk dua kelompok, yakni kelompok yang terlibat dalam aksi demo di satu pihak dan mereka yang tidak terlibat di lain pihak. Selanjutnya mereka diberi pengarahan dan nasehat moral oleh Danpos Uwibutu supaya lain kali tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti itu lagi.

Pada tanggal 24 Mei 2000, seluruh masyarakat Madi dipanggil ke kantor Camat Enarotali untuk menerima pengarahan dan nasihat yang sama dari Camat dan Danramil. Sesudah itu diteruskan dengan acara makan bersama di rumah bapak Danramil Enarotali sebagai tanda damai antara TNI dengan masyarakat dengan disaksikan oleh Camat Enarotali, Bpk. Naftali Yogi.

Dari apa yang digambarkan diatas ini dapat disimpulkan bahwa kehadiran kelompok Yogi tetap dibiarkan oleh pihak militer yang sebenarnya bermaksud menumpas kelompok tersebut. Pihak

militer terkesan kuat memanfaatkan kelompok Yogi bukan saja sebagai legitimasi atas penerapan DOM di Paniai (yang sebenarnya sudah dicabut secara resmi sejak Oktober 1998!), melainkan pula sebagai 'sarana politik praktis' guna melawan pengembangan aspirasi masyarakat dan guna menciptakan suatu konflik horisontal ditengah-tengah masyarakat yang sederhana. Pada suatu saat bukan tidak mungkin tindakan membiarkan ini menjadi biang keladi konflik intern masyarakat setempat mengingat segala kerugian dan penderitaan yang telah lama ditanggung masyarakat desa di sekitar Tiga Danau itu yang terjepit di dalam pertikaian antara tentara dengan kelompok Yogi.

### **III.2. Kehadiran tentara dalam dua tahun terakhir**

Sejak berakhirnya perang Madi (1981-1982), tentara menempatkan pos-pos penjagaan di wilayah sekitar Tiga Danau dan melakukan berbagai patroli dan operasi militer. Tujuan dari pendirian pos, patroli, dan operasi militer tersebut adalah untuk menghadapi kelompok OPM yang dipimpin oleh Tadeus Yogi. Pendirian pos pertama di Pugo menandai titik awal kehadiran militer di desa-desa, dan titik awal munculnya berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara. Sejarah kehadiran ini masih berkelanjutan terus dan terungkap dalam beberapa kasus yang aktual (1999-kini) yang kami laporkan di bawah ini:

#### **III.2.1. Kasus Paniai Timur**

Kasus kekerasan di Paniai Timur yang hendak digarisbawahi dalam laporan ini terjadi di desa-desa : Pugo I, Pugo II, Pugo III, Papato, Timida, Madi, Uwibutu, Kopo, dan Ipakiye. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh militer adalah membebankan **tiga kewajiban** yang mengakibatkan masyarakat merasa sakit hati tetapi tak kuasa menolak.

Ketiga kewajiban itu adalah:

- 1̄ **kewajiban kerja bakti**: setiap hari Rabu, seluruh kaum laki-laki dewasa—kecuali para guru—diwajibkan melakukan kerja bakti di sekitar Pos Penjagaan Tentara. Kewajiban ini dikontrol dengan buku absensi sehingga orang yang tidak hadir dicatat dengan cermat. Jika ada orang yang tidak hadir, maka seluruh warga desa tempat tinggal orang yang bersangkutan akan mendapatkan hukuman kolektif. Hukuman itu berupa: denda uang, denda hasil bumi dan babi, serta hukuman badan (dipukul, direndam di kali).
- 2̄ **kewajiban jaga malam/ ronda malam** : setiap malam warga desa juga diwajibkan melakukan jaga malam di pos jaga malam di setiap desa. Pelaksanaannya dikontrol dengan ketat oleh tentara yang mengadakan patroli untuk mengecek kelangsungan jaga malam. Desa yang lalai menjalankan kewajiban ini akan dihukum secara kolektif dengan denda uang, denda hasil bumi/ babi, dan/ atau hukuman badan.

- 3 **kewajiban mengangkut jatah makanan tentara dari Enarotali ke Pos penjagaan:** para pemuda desa diwajibkan mengangkut jatah makanan tentara dari Enarotali ke Pos penjagaan di Desa Uwibutu tanpa pembayaran apapun. Penolakan terhadap kewajiban ini juga akan mendatangkan hukuman denda uang atau hukuman badan.

Tiga kewajiban itu masih saja diberlakukan saat Pos Penjagaan dipindahkan dari Desa Pugo ke Desa Uwibutu sekitar tahun 1990-an. Kewajiban itu berlaku untuk warga desa di desa-desa. Kewajiban ***jaga malam*** akhirnya dihentikan pada tahun 1999. Akan tetapi, kewajiban ***kerja bakti*** dan ***mengangkut jatah makanan*** tentara masih tetap berjalan hingga hari ini meski segi hukuman dalam kewajiban kerja bakti telah dihilangkan sejak tanggal 1 Desember 1999 lalu.

Akibat tiga kewajiban yang sudah bertahun-tahun diberlakukan itu, masyarakat betul-betul terjepit karena di satu sisi mau menolak tetapi di lain sisi takut akan tindakan tentara yang lebih keras lagi. Dalam suasana kemasyarakatan Papua dewasa ini, situasi semacam ini akan mudah meledak menjadi bentrokan fisik antara masyarakat desa dengan tentara. Karena itu, masyarakat menuntut supaya:

- 1 tiga kewajiban dicabut seluruhnya
- 2 tentara ditarik dari desa-desa mereka karena kehadirannya sangat menekan masyarakat
- 3 tentara boleh meminta tenaga masyarakat untuk mengangkut barang tetapi harus membayar ongkos pengangkutan secara wajar, yakni antara Rp. 10.000,- hingga Rp. 35.000,- (tergantung berat ringannya barang).

### ***III.2.2. Kasus Tigi***

Kehadiran tentara Batalyon Infantri 753 Paniai di Waghete mendatangkan situasi yang meresahkan masyarakat. Sejumlah tindakan arogan<sup>13</sup> kerap kali terjadi seperti

- mengeluarkan tembakan sembarangan di muka umum (pasar),
- menjatuhkan denda yang tidak wajar jika ada babi masuk ke halaman pos tentara,
- mencampuri urusan pemerintahan desa dan kecamatan,
- dan terakhir adalah kasus intimidasi terhadap sejumlah warga desa Waghete beserta Camat Tigi: Yan Giyai pada tanggal 13-17 Agustus 1999.

Kasus terakhir ini (kasus intimidasi terhadap warga desa dan Camat Waghete) diambil sebagai contoh pola kekerasan yang terjadi. Kronologi peristiwa adalah sbb.:

### ***Kamis, 13 Agustus 1999***

---

<sup>13</sup> Pola kekerasan yang sama telah dilaporkan dalam : *Laporan Situasi Hak-hak Azasi Manusia di Wilayah Paniai dan Tigi*, Jayapura: Oktober 1998.

Diadakan lomba lari maratho di Waghete sebagai bagian dari rangkaian lomba perayaan HUT Kemerdekaan RI di pusat kecamatan Tigi. Banyak warga masyarakat ikut dalam lomba maratho yang mengambil rute: mengelilingi desa Waghete. Di aula majelis taklim diadakan lomba lainnya: lomba main kartu 'yoker'. Dalam pertandingan itu beberapa anggota Yonif 753 ikut di dalamnya. Tiba-tiba, salah seorang polisi melempar batu ke atap aula tersebut sehingga salah seorang tentara keluar aula untuk mencari pelaku pelemparan itu dan siap untuk memukulnya. Akan tetapi, komandannya masih menahan anak buah itu untuk tidak bertindak lebih jauh.

#### ***Jumat, 14 Agustus 1999***

Di depan pasar, polisi yang kemarin melemparkan batu dihadapi oleh 4 orang tentara: Prada Jalil, Praka Jefri, Prada Tera, dan Pratu Suldin. Tentara itu memerintahkan supaya polisi minta maaf dan hal itu dibuat oleh polisi tersebut. Tetapi tiba-tiba Prada Jalil, Praka Jefri, dan Prada Tera memukuli polisi itu. Kemudian Pratu Suldin mengeluarkan tembakan dari senjata laras panjang untuk mengusir warga masyarakat yang mengerumuni mereka. Tetapi, tembakan itu melukai Hendrikus Pekei (warga desa Ugiya) yang sedang ikut lomba lari maratho di bagian kakinya dan seorang lain: Pakage yang terserempet peluru di dahinya. Hendrikus Pekei langsung diangkut ke Nabire dengan pesawat Casa guna mendapatkan perawatan medis yang memadai atas perintah Camat Tigi: Yan Giyai. Pakage bisa dirawat di Puskesmas Waghete karena hanya luka ringan. Kejadian ini dilaporkan oleh Camat kepada Dandim Paniai di Nabire dan kepada Bupati Paniai.

#### ***17 Agustus 1999***

Diadakan upacara bendera memperingati HUT Kemerdekaan RI di halaman kantor Camat Tigi. Kira-kira pk. 10.00 pagi, saat Camat Yan Giyai sedikit beristirahat di rumahnya setelah memimpin upacara bendera, dua orang anggota Yonif 753 Pos Waghete datang ke rumah Camat dan memintanya untuk ikut ke pos tentara. Camat mengikuti permintaan itu dan pergi dengan masih mengenakan seragam Camat putih-putih dengan segala atributnya. Akan tetapi, mereka ternyata pergi ke pasar. Di situ Danton 753 Letda Judin Tija dan sejumlah anak buahnya telah siap. Camat ditodong dengan pistol di kepalanya dan dituduh memberikan laporan palsu kepada Dandim karena mengatakan ada dua korban padahal hanya ada satu. Camat menjelaskan bahwa memang ada dua korban: satu diangkut ke Nabire dan satu dirawat di Puskesmas Waghete. Penjelasan ini rupanya tidak bisa diterima oleh tentara. Dia hampir dianiaya oleh kelompok tentara itu dan tiba-tiba Danramil Waghete: Kapten Windessy muncul dan menahan Danton untuk bertindak lebih jauh. Setelah diinterogasi kira-kira satu jam di depan masyarakat, perundingan dilanjutkan di Koramil Waghete secara tertutup dan dicapai kesepakatan damai. Untuk ini Camat Yan Giyai akan menyelenggarakan upacara perdamaian. Camat memilih jalan

itu karena dia melihat bahwa masyarakat Tigi telah siap-siap *waita*<sup>14</sup> untuk membela Camat. Seandainya dia berkeras untuk melawan, niscaya akan jatuh korban di pihak masyarakat.

#### **24 Agustus 1999**

Diadakan upacara perdamaian oleh Camat di Koramil Waghete dengan potong kambing, ayam, dan babi. Dengan upacara perdamaian ini, perselisihan antara Camat dengan pihak Yonif 753 Pos Waghete dianggap selesai.

#### **25 Agustus 1999**

Camat beserta keluarganya berangkat ke Enarotali untuk pelantikan dan atas izin Bupati Paniai, berada di situ hingga pasukan Yonif 753 (yang sedang bertugas) ditarik dari Waghete. Camat mengambil tindakan itu karena sejumlah kepala desa di Kecamatan Tigi telah termakan isu yang disebarluaskan oleh tentara Yonif 753 Pos Waghete, yakni bahwa Camat Yan Giyai dan Kaur Keuangan Kecamatan Tigi telah 'makan uang' 30% dari jatah dana JPS (Jaring Pengaman Sosial) padahal sebenarnya dana tersebut belum dicairkan. Akibat isu itu para kepala desa tersebut siap untuk ambil tindakan keras jika Camat kembali ke Waghete.

#### **Oktober 1999**

Diadakan pertemuan antara masyarakat dengan Bupati Paniai di Waghete guna membahas dana JPS. Bupati Paniai Yan Douw memberikan penjelasan kepada masyarakat Tigi bahwa 30% dana JPS memang belum dicairkan. Hal ini berlaku untuk seluruh Indonesia.

#### **November 1999**

Danton Letda Judin Tija mendatangi Camat Yan Giyai di Enarotali dan meminta uang damai Rp. 1,5 juta.

#### **17 Februari 2000**

Pasukan Yonif 753 Pos Waghete yang dipimpin oleh Danton Letda Judin Tija digantikan oleh pasukan yang lain dari batalyon yang sama. Dan dalam minggu berikutnya, Camat sekeluarga kembali ke Waghete dari Enarotali.

---

<sup>14</sup> *Waita* adalah ungkapan emosi khas orang Mee yang memuat berbagai pesan seperti kegembiraan, sukacita, permainan (tarian), penyambutan tamu, tapi juga kemarahan. Dalam situasi seperti yang dilaporkan, emosi kemarahan inilah yang hendak diungkapkan.

## ***BAGIAN IV***

# **ANALISIS DAN KESIMPULAN**

### **IV.1.**

Jika kasus-kasus aktual dilihat sebagai hal tersendiri, pastilah gambaran penderitaan tidak akan terungkap sebagai sejarah tetapi lebih menyerupai insiden-insiden kecil belaka. Akan tetapi, jika kasus tersebut dirangkaikan dengan benang peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, lengkaplah sebuah kisah sejarah penderitaan masyarakat Paniai.

### **IV.2.**

Sejarah masyarakat Paniai itu untuk waktu yang begitu lama tidak terungkap atau lebih tepat : tidak boleh diungkapkan. Karenanya sejarah itu membawa sejumlah unsur yang terus melukai hati masyarakat:

- ❑ Trauma mendalam yang mengakibatkan ketakutan
- ❑ Konflik yang tak terselesaikan
- ❑ Kebebasan bergerak tak terjamin
- ❑ Penghargaan atas kerja juga tidak terjamin
- ❑ Kewibawaan pemerintah sipil tidak dihiraukan

#### ***Trauma mendalam yang mengakibatkan ketakutan***

Selama kurang lebih tiga dasawarsa, masyarakat desa di Wilayah Kecamatan Paniai Timur dan Tigi dibesarkan dalam atmosfer ketakutan traumatik. Dalam kasus aktual, atmosfer ketakutan itu mengakibatkan masyarakat desa di Kecamatan Paniai Timur tidak kuasa menolak segala kewajiban yang dibebankan secara sewenang-wenang kepada mereka oleh pihak tentara Yonif 753 Pos Uwibutu. Sementara itu di Waghete, masyarakat diintimidasi dengan tindakan arogan tentara Yonif 753 Pos Waghete kepada Camat. Masyarakat nyaris menjadi korban seandainya Camat melawan tindakan arogan tentara pada saat itu juga. Camat telah melakukan tindakan yang benar dengan menyelamatkan korban kekerasan tentara dan melaporkannya kepada pejabat yang berwenang: Dandim dan Bupati. Akan tetapi, mengapa tentara dengan teror menuduh Camat memberikan laporan palsu? Bukankah tindakan kekerasan semacam itu hanya mau menunjukkan upaya rekayasa untuk menutupi kebenaran?

#### ***Konflik yang tak terselesaikan***

Masyarakat Paniai selain memiliki sejarah penderitaan juga memiliki sejarah perlawanan rakyat terhadap kesewenangan pihak luar: polisi, tentara, pemerintah, ataupun agamawan. Kehadiran militer dan kelompok Yogi sebagai sumber-sumber konflik utama tetap dipelihara secara sistemik sehingga konflik di hati masyarakat juga terus dikobarkan. Bukankah dengan melestarikan

sumber-sumber konflik, rasa aman tidak pernah terjamin? Akibat berikutnya: bukankah situasi konflik dengan mudah melahirkan rangkaian tindak kekerasan entah oleh pihak tentara entah oleh pihak Yogi entah oleh pihak masyarakat sendiri? Ada kesan yang kuat seakan-akan suatu konflik horisontal mau dipupuk/diciptakan terus guna melawan gerakan 'Aspirasi M' yang sedang mewarnai suasana sosio-politik Papua.

### ***Kebebasan bergerak tidak terjamin***

Selama kurang lebih dua dasawarsa (sejak berakhirnya perang Madi 1981/1982), masyarakat diwajibkan membawa surat jalan oleh militer sebagai bagian dari penerapan DOM. Selain melukai hati, sistem itu juga sangat membatasi komunikasi dan relasi kekerabatan antar-masyarakat karena kunjungan-kunjungan antar-desapun harus dengan izin dari aparat keamanan. Kewajiban surat jalan memang bagian penting dari sistem DOM tetapi sudah dihapuskan sejak pencabutan DOM tahun 1998. Akan tetapi, ada sejumlah kewajiban yang lebih mengikat tetapi kurang formal yang terus dijalankan oleh militer terhadap masyarakat. Tiga kewajiban (kerja bakti, jaga malam, angkut bama tentara) inilah yang untuk waktu lama dibebankan kepada masyarakat di sekitar pos tentara di Pugo dan kemudian Uwibutu. Masyarakat desa di Wilayah Kecamatan Paniai Timur bertahun-tahun lamanya tidak berdaya bahkan untuk melakukan pekerjaan harian: kerja di kebun, istirahat malam, pergi berjualan di pasar. Tiga kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat betul-betul membatasi mereka karena di balik kewajiban itu ada hukuman fisik dan denda uang yang mengancam.

Situasi yang serupa juga dialami oleh masyarakat di sekitar Waghete karena kehadiran tentara senyatanya tidak mendatangkan rasa aman apalagi rasa nyaman. Sebaliknya, kehadiran mereka mendatangkan situasi resah. Setiap gerak langkah masyarakat yang dianggap salah oleh tentara segera mendapatkan hukuman yang keras dan tidak wajar.

### ***Penghargaan atas pekerjaan***

Setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan upah atau gaji. Ketentuan ini wajar. Akan tetapi, ternyata masyarakat sejumlah desa di Kecamatan Paniai Timur itu harus melaksanakan kerja paksa. Mereka terpaksa menerima kenyataan bahwa tidak mendapatkan upah setelah mengangkut barang milik tentara dari Enarotali ke Pos Tentara Yonif 753 di Uwibutu. Mereka mau menuntut tetapi takut akan hukuman yang akan dijatuhkan; padahal sebenarnya berhak atas upah antara Rp. 10.000,- hingga Rp. 35.000,- tergantung berat-ringannya beban. Berdasarkan apakah tindakan pemaksaan ini bisa dibenarkan?

### ***Kewibawaan Pemerintah Sipil tak dihiraukan***

Akibat penerapan sistem DOM, untuk waktu yang lama, pemerintah sipil kurang berfungsi dan kurang dihiraukan oleh militer. Pengaruh sistem DOM rupanya belum juga hilang meski secara formal status itu telah dihapuskan tahun 1998. Indikasi yang terang benderang bisa dilihat dalam tindakan: intimidasi tentara Yonif 753 Pos Waghete terhadap Camat Tigi di depan mata warga

masyarakat merusak kewibawaan pemerintah desa/ kecamatan. Selain itu, masyarakat turut marah karena merasa turut dipermalukan. Malah hampir saja pecah bentrokan fisik antara masyarakat dan tentara yang pasti akan menimbulkan korban. Tindakan teror itu ternyata tidak berhenti di situ saja melainkan berlanjut dengan penyebaran isu korupsi dana JPS oleh Camat dan tuntutan “uang damai” sebesar Rp. 1,5 juta. Berdasarkan apakah tentara merasa berhak menginterogasi apalagi menteror Camat sedemikian rupa dan dilanjutkan dengan penyebaran isu dan tuntutan denda? Bukankah dengan tindakan teror, penyebaran isu, dan denda uang, tentara mengajarkan contoh sikap yang sedemikian buruk kepada masyarakat mengenai penghargaan terhadap pemerintah desa/ kecamatan?

***Pertanyaan-pertanyaan di atas sepatutnya ditanggapi secara serius oleh segala pihak yang terkait.***

\*\*\*\*\*